



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA 2016 - 2021)**

KECAMATAN SIMPANG RAYA

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BABI PENDAHULUAN	I - 1
Latar Belakang	I – 1
Landasan Hukum	I – 4
Maksud dan Tujuan	I – 7
Sistematika Penulisan	I – 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II – 1
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	II – 1
SUMBER DAYA KEC. SIMPANG RAYA	II – 4
Sumber Daya Manusia (SDM)	II – 4
Sarana Prasarana	II – 5
KINERJA PELAYANAN KEC. SIMPANG RAYA	II – 6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Simpang Raya	II – 6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kec. Simpang Raya	II – 8
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KEC. SIMPANG RAYA	II – 10
Tantangan	II – 10
Peluang	II – 11
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III – 1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KEC. SIMPANG RAYA	III – 1
TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	III – 3

PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Simpang Raya 2020

TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SULAWESITENGAH	III - 9
Telaahan RenstraKementerian/Lembaga	III - 9
Telahan Renstra SulawesiTengah	III - 13
BABIV : TUJUAN DAN SASARAN	IV - 1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KEC. SIMPANG RAYA	IV - 1
4.1.1 Tujuan	IV - 1
4.1.2 Sasaran	IV - 2
BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V - 1
BABVI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI - 1
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII - 1
BAB VIII : PENUTUP	VIII - 1

Daftar Tabel

Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Simpang Raya Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2018	II - 5
2.2	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Simpang Raya Tahun 2018	II - 6
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Simpang Raya Kab. Banggai	II - 7
2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Simpang Raya Kab. Banggai	II - 9
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. Simpang Raya Kab. Banggai	III - 2
3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III - 8
3.3	Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019	III - 9
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Simpang Raya	IV - 3
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V - 2
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai	VI - 2
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII - 1

Daftar Gambar

Gambar	JudulGambar	Halaman
2.1	Susunan Organisasi Kecamatan Simpang Raya	II -3
2.2	Kondisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Simpang Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	II -4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah; (2) rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan (3) rencana pembangunan tahunan. Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Simpang Raya adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Simpang Raya untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Simpang Raya 2020

yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Simpang Raya yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Perubahan Renstra Kecamatan Simpang Raya Tahun 2016-2021 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Kecamatan Simpang Raya mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Banggai juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Kementerian Dalam Negeri, Renstra Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaantahunan.

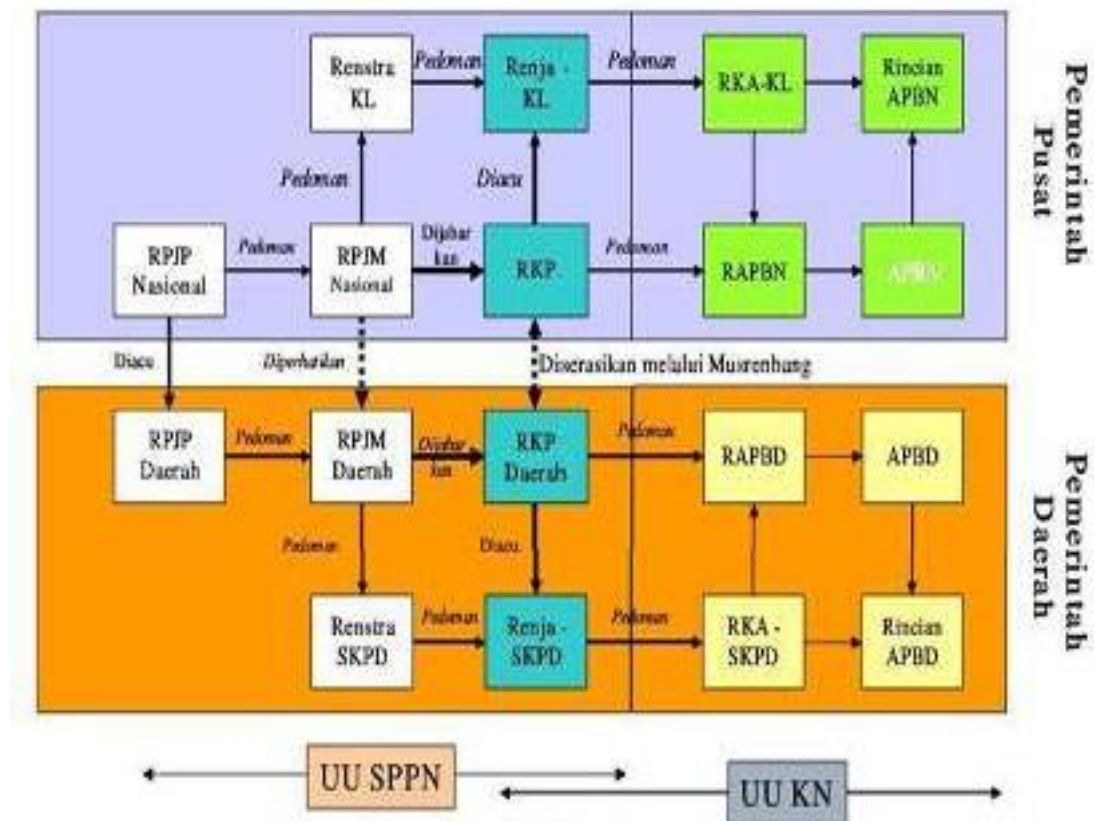
Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Simpang Raya dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2011-2016 serta rencanapelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Perubahan Renstra Kecamatan Simpang Raya Tahun 2016-2021 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Simpang Raya 2020

Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang juga dalam proses penyusunan perubahan. Oleh karena itu, proses penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Simpang Raya Tahun 2016-2021 dilaksanakan simultan dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016- 2021.

Adapun hubungan antar dokumen sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Bappenas, 2004

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan

bahwaperencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dandokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-DaerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
3. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

PERUBAHAN RENSTRA **Kec. Simpang Raya 2020**

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

PERUBAHAN RENSTRA **Kec. Simpang Raya 2020**

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor112);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan TataKerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2336);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah sebagai acuan resmi bagi Kecamatan Simpang Raya dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Simpang Raya dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kecamatan Simpang Raya .

Tujuan disusunnya Rencana strategis Simpang Raya adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Simpang Raya Tahun 2016–2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III** : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang memuat bahasan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sulawesi Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan Isu-isu Strategis.

PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Simpang Raya 2020

- BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN, yang memuat bahasan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, yang memuat bahasan tentang Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan.
- BABVI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, yang memuat tentang uraian Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BABVII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, yang memuat tentang Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- BABVIII : PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Kecamatan Simpang Raya menyelenggarakan unsure penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan Simpang Raya dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di

PERUBAHAN RENSTRA **Kec. Simpang Raya 2020**

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Kecamatan Simpang Raya mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Simpang Raya, Susunan Organisasi Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai terdiri atas :

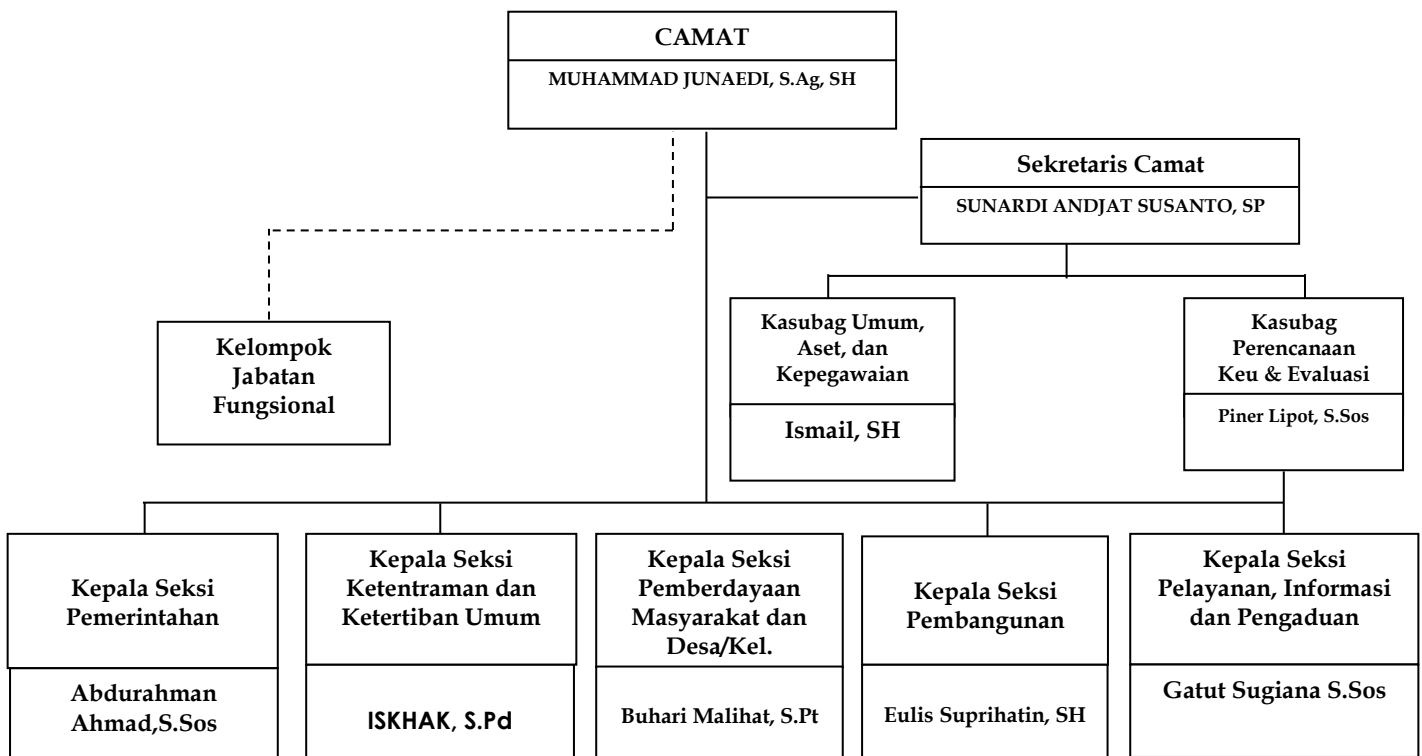
1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Simpang Raya 2020

3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Simpang Raya sebagai berikut :

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Simpang Raya

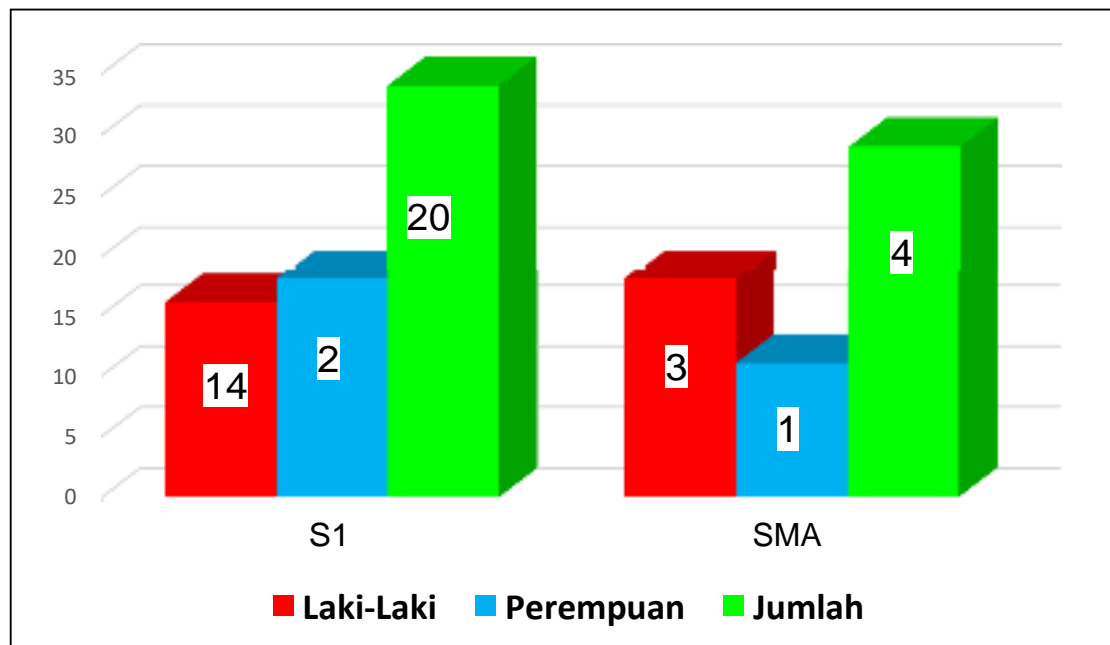


2.2 SUMBER DAYA KEC. SIMPANG RAYA

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap Pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Simpang Raya didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari PNS Kelurahan dan Kecamatan ditinjau dari tingkat pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kondisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Simpang Raya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019



Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Simpang Raya 2020

Sedangkan Kondisi Kepegawaian dilihat berdasarkan pangkat dan golongan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Simpang Raya
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2019

NO	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/b	1	-	1
2.	Golongan IV/a	-	-	-
3.	Golongan III/d	2	-	2
4.	Golongan III/c	1	1	2
5.	Golongan III/b	1	-	1
6.	Golongan III/a	8	1	2
7.	Golongan II/d	-	-	-
8.	Golongan II/c			2
9.	Golongan II/b	2	1	3
10.	Golongan II/a	2	-	2
Jumlah		17	3	20 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Simpang Raya 2020

SARANA PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Simpang Raya dan Kelurahan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagaimana terlihat pada data sebagai berikut:

PERUBAHAN RENSTRA
Kec. Simpang Raya 2020

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Simpang Raya Tahun 2018

No.	Jenis / Nama Barang	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1	Tanah	1	√	
2	Gedung	1	√	
3	Listrik	3500	√	
4	Area Parkir	1	√	
5	Ruang Rapat	1	√	
6	Kendaraan Roda 4	1	√	
7	Kendaraan Roda 2	7	√	
8	Meja Rapat	2	√	
9	AC	3	√	
10	Komputer PC	6	√	
11	Laptop	5	√	
13	Meja Kerja	10	√	
14	Kursi Kerja	11	√	
15	Lemari Arsip	4	√	
16	Kursi Plastik Rapat	255	√	
17	Generating Set	1	√	
18	Sound System	1	√	
19	Sofa	3	√	
20	Printer	4	√	
21	UPS	6	√	
22	Tabung APAR	1	√	
23	Proyektor	1	√	
24	Dispenser	2	√	
25	Mesin Pemotong Rumput	4	√	
26	Hardisk External	2TB	√	
27	Kipas Angin	8	√	

Sumber : Data Aset Kecamatan Simpang Raya 2018

2.3 KINERJA PELAYANAN KEC. SIMPANG RAYA

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KEC. SIMPANG RAYA

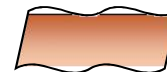
Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Simpang Raya selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Simpang Raya 2019

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Simpang Raya Kab. Banggai

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja				C	C	CC	CC	CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat				65	68	71	73	75	63,21	64,42	66,76	67,85	68,93	97,25	94,74	94,03	92,95	91,91
3.	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				341	342	343	344	345	341	342	343	344	345	100	100	100	100	100



Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa gambaran pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Simpang Raya selang tahun 2011-2015 dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2011 sebesar 63,21% meningkat menjadi 68,93% pada tahun 2015. Untuk indikator tingkat disiplin ASN menunjukkan trend kenaikan sebesar 65,34% pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 73,25% pada tahun 2015.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
KEC. SIMPANG RAYA**

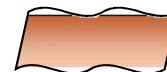
Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas, diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel berikut :

PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Simpang Raya 2020

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Simpang Raya Kab. Banggai

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai																	
Belanja Langsung																	
Belanja Pegawai																	
Belanja Barang & Jasa																	
Belanja Modal																	



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Simpang Raya dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan anggaran. Hal ini tidak lain sebagai bentuk dukungan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.4 TANTANGAN & PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KEC. SIMPANG RAYA

TANTANGAN

Tantangan merupakan hal/obyek yang harus ditanggulangi/diraih/dilakukan. Tantangan Kecamatan Simpang Raya ke depan adalah sebagai berikut:

1. Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
3. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.

PERUBAHAN RENSTRA **Kec. Simpang Raya 2020**

5. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
6. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
7. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELUANG

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Adapun peluang bagi Kecamatan Simpang Raya dalam melaksanakan ketugasannya adalah :

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur.
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI PELAYANAN KEC. SIMPANG RAYA

Kecamatan Simpang Raya berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Simpang Raya masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

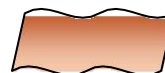
1. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerahlain.
4. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat

PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Simpang Raya 2020

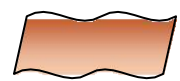
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kec. Simpang Raya Kab. Banggai

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EXTERNAL	
1. Pelimpahan Kewenangan	Regulasi terkait pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat masih sementara dalam tahap kajian	Peraturan Bupati Banggai tentang pelimpahan Kewenangan		Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah	Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Sumber Daya Aparatur yang memadai	Sumber Daya Aparatur yang ada saat ini masih perlu peningkatan keahlian sehingga Sumber Daya Aparatur yang ada mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan lebih baik lagi	SOP Kecamatan Simpang Raya	SDM dan anggaran yang terbatas	Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah	Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan
3. Pelayanan kepada masyarakat	Pelayanan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik akan tetapi kewenangan	Peraturan Bupati Banggai tentang pelimpahan Kewenangan	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kewenangan kecamatan terkait	Tuntutan pelayanan yang cepat	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan



PERUBAHAN RENSTRA Kec. Simpang Raya 2020

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EXTERNAL	
	kecamatan yang terbatas sehingga waktu yang dibutuhkan masyarakat terkait pelayanan cukup panjang		pelayanan		pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan PD lain
4. Standar Pelayanan Masyarakat	Sumber Daya Aparatur yang ada saat ini masih perlu peningkatan pemahaman terkait SPM	Peraturan ttg pelayanan publik, SOP dan SPP	Kapasitas SDM dan anggaran yang terbatas	Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah	Belum optimalnya standar pelayanan kepada masyarakat



**TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai periode 2016-2021 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**. Penjabaran Visi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kabupaten Banggai, merupakan kesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959, termasuk sarana dan prasarana, kelembagaan serta potensi sumber daya alam dan lingkungan alamiah.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan ekonomi yang dapat mempengaruhi atau memberikan imbas terhadap daerah sekitar atau hinterlandnya, utamanya wilayah/daerah Kabupaten di kawasan timur pulau Sulawesi. Pusat pertumbuhan ekonomi di maksud dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif Kabupaten Banggai dibanding daerah hinterlandnya, yaitu dari posisi geografis, potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan daerah yang telah di kembangkan ataupun akan dikembangkan.

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Simpang Raya 2020

Pusat Pertanian, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan dan pengembangan pertanian di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerahserta kemandirian pangan berkelanjutan.

Pusat Kemaritiman, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan dan pengembangan kemaritiman di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi perikanan, fasilitasi/pengembangan konektivitas dan perdagangan antar pulau, dan pengembangan industri/jasa transportasi laut serta pengembangan wisata maritim/bahari, guna mendukung perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pemikiran pusat kemaritiman ini dilandasi oleh posisi geografis Kabupaten Banggai yang saling berhadapan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Kabupaten Taliabo Maluku Utara yang merupakan daerah kepulauan. Karena urusan Kelautan (kemaritiman) bukan lagi menjadi kewenangan daerah Kabupaten, maka perwujudan visi ini di lakukan melalui koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program dengan pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat.

Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya, dimaksudkan bahwa perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pertanian dan pusat kemaritiman, harus di dasarkan atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat

PERUBAHAN RENSTRA **Kec. Simpang Raya 2020**

Kabupaten Banggai (Babasalan). Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap bersendikan agama.

Upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Banggai dirumuskan melalui Misi sebagai penjabaran visi Kabupaten Banggai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021, adalah sebagai berikut:

- 1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa.**
- 2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi.**
- 3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah.**
- 4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.**
- 5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya.**
- 6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah.**

Kecamatan Simpang Raya mendukung Misi 1 dan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Simpang Raya 2020

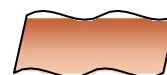
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Simpang Raya 2019

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN BAGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA			
MISI	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang berwibawa. 2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi. 3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman berbasis Potensi Wilayah. 4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata. 5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Keraifan Lokal dan Budaya. 6. Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia dan Daya Saing Daerah.	5. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan. 6. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan. 7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain. 8. Masih adanya tugas pembantuan serta fasilitasi kegiatan PD lain ditingkat kecamatan dan kelurahan sehingga mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan. 9. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat	1. Adanya kecenderungan untuk menambah kegiatan yang dilimpahkan 2. Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Adanya keluaran kegiatan PD lain yang ada di Kecamatan 4. Tugas pembantuan serta fasilitasi kegiatan PD lain ditingkat kecamatan dan kelurahan 5. Banyak prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan	1. Perlunya dukungan lembaga kemasyarakatan 2. Diklat peningkatan kapasitas aparatur 3. Mendekatkan pelayanan masyarakat 4. Mendekatkan lokasi khusus kegiatan kepada masyarakat 5. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan



PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Simpang Raya 2019

TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SULAWESI TENGAH

TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Renstra Kecamatan Simpang Raya Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah seyogyanya berkesesuaian dengan Renstra Kemendagri tahun 2015-2019, sehingga kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Simpang Raya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut sasaran Kemendagri periode 2015-2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			2015	2019
1.	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa
2.	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1. Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		2. Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10 %	< 10 %
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1. Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2. Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%
		3. Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Simpang Raya 2019

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
		2015	2019
	4. Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
	5. Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1. Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
	2. Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
	3. Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi dan 204 kab/ kota
	4. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
	5. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
	6. Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota
5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Simpang Raya 2019

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
		2015	2019
pemerintahan di daerah			
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1. Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
	2. Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
	3. Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
	4. Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1. Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
	2. Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
	3. Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1. Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	34 provinsi 514 Kab/kota
	2. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunannasional	1. Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga

PERUBAHAN RENSTRA Kec. Simpang Raya 2019

	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			2015	2019
		2. Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1. Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2. Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3. Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitasSDM	30%	80%
11.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2. Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12.	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1. Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2. Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Beberapa sasaran kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri yang telah berjalan dengan baik di Kecamatan Simpang Raya yaitu sebagai berikut:

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.

PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Simpang Raya 2019

2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Simpang Raya tanpa kecualidengan mengedepankan perempuan, masyarakat miskin, balita, disabilitas dan lansia.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN SIMPANG RAYA

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Simpang Raya yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Simpang Raya 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Simpang Raya Kabupaten Banggai. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Simpang Raya memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan”**.

PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Simpang Raya 2019

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Simpang Raya dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat;
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat;

SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Simpang Raya untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Simpang Raya menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya pelayanan publik Kecamatan Simpang Raya

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Simpang Raya sebelum dan sesudah SAKIP sebagaimana tabel berikut.

PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Simpang Raya 2019

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Simpang Raya Sebelum SAKIP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Simpang Raya	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih & akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Simpang Raya	B	BB	A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Simpang Raya	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	77%	79%	81%	83%
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Simpang Raya	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Simpang Raya Utara yang baik, bersih dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	77	79	81	83	85%



PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Simpang Raya 2019

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Simpang Raya Sesudah SAKIP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Simpang Raya	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih & akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Simpang Raya			A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Simpang Raya	Indeks Kepuasan Masyarakat			79%	81%	83%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Simpang Raya . Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Simpang Raya tahun 2016 – 2021 sebelum dan sesudah SAKIP sesuai dengan misi Kabupaten Banggai disajikan sebagai berikut:

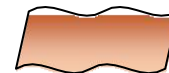
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih dan akuntabel	Mengoptimalkan Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya
		2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Simpang Raya	Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Simpang Raya	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih dan Akuntabel	Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih dan Akuntabel	Mengoptimalkan Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya
		2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Simpang Raya	Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



BAB VI

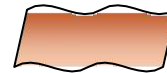
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Simpang Raya akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel berikut yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Simpang Raya 2019

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai Sebelum SAKIP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan				1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SIMPANG RAYA		B	448,384,183.00	BB	442,794,545.00	A	460,803,650.00	A	491,189,160.00	A	590,654,510.00	A	2,433,826,048.00	Sekretariat Kecamatan	Kec Simpang Raya
1	1. Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih & Akuntabel			Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SIMPANG RAYA		B	448,384,183.00	BB	442,794,545.00	A	460,803,650.00	A	491,189,160.00	A	590,654,510.00	A	2,433,826,048.00		
	1.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran		100	338,852,069.00	100	257,610,650.00	100	335,473,650.00	100	336,242,760.00	100	415,030,860.00	100%	1,683,209,989.00		
		161.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang di sediakan	215 Lembar	280	1,590,000.00	400	2,250,000.00	425	2,550,000.00	460	2,760,000.00	490	2,940,000.00	2055	12,090,000.00		
		161.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di Sediakan	1 Jaringan	1	7,000,000.00	1	7,000,000.00	2	34,000,000.00	1	7,000,000.00	1	9,000,000.00	1 Jaringan	64,000,000.00		
		161.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 2 Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	2 Orang 16 Jenis	2 15	12,394,870.00 0	2 18	21,527,000.00 0	2 18	21,559,050.00 0	2 14	21,819,560.00 0	2 18	22,170,160.00 0	2 Orang 18 Jenis	99,470,640.00		
		161.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	15 Jenis	15	9,984,000.00	20	8,300,000.00	30	8,749,300.00	30	11,209,600.00	30	12,867,100.00	30 Jenis	51,110,000.00		
		161.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Jumlah Penggandaan / Foto Copy 2 Jumlah Barang Cetakan	10000 Lembar 30 Buku	15000 60	9,984,000.00 0	10140 60	6,981,000.00 0	12500 80	8,645,000.00 0	13500 85	9,327,500.00 0	14500 85	9,977,500.00 0	14500 Lembar 85 Buku	44,915,000.00		
		161.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntr	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	8	2,434,900.00	8	2,252,650.00	8	2,670,300.00	8	3,126,100.00	8	3,126,100.00	8 Jenis	13,610,050.00		
		161.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangn	Jumlah Surat Kabar / Majalah Yang di Sediakan	1 Surat Kabar	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1 Surat Kabar	15,000,000.00		
		161.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang di Sediakan	3020 Dos	2696	59,148,000.00	3405	69,000,000.00	3180	69,900,000.00	3350	74,700,000.00	3400	76,450,000.00	16031 Dos	349,198,000.00		

161.18	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 Orang	5	58,000,000.00	3	36,000,000.00	7	66,000,000.00	6	51,000,000.00	10	102,000,000.00	10 Orang	313,000,000.00		
161.19	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14 Orang	14	84,291,299.00	14	58,100,000.00	17	68,000,000.00	16	93,500,000.00	16	110,500,000.00	16 Orang	414,391,299.00		
161.20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	1 Jumlah Tenaga Administrasi 2	15 Orang	15	91,025,000.00	6	43,200,000.00	7	50,400,000.00	7	58,800,000.00	7	63,000,000.00	7 Orang	306,425,000.00		
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	0	82	102,532,114	84	165,403,895	86	105,780,000	88	107,946,400	90	155,623,650	90%	637,286,059		
162.5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	2 Unit	1	18,119,000	1	27,000,000	1	37,620,000	1	30,000,000	2	60,000,000	6 Unit	172,739,000		
162.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan	1 Jenis	3	22,173,114	5	32,650,000	3	7,000,000	2	1,800,000	2	5,400,000	15 Jenis	69,023,114		
162.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	4 Jenis	4	21,975,000	6	46,628,370	2	21,000,000	2	18,685,000	3	31,448,650	17 Jenis	139,737,020		
162.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair Gedung Kantor yang Diadakan	7 Jenis	3	13,000,000	2	5,765,525	0	0	2	8,096,400	2	6,825,000	9 Jenis	33,686,925		
162.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah jabatan/dinas yang rutin dilakukan pemeliharaan	2 Rumah Jabatan	2	15,200,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	16,000,000	2 Unit Rumah Jabatan	76,200,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor													0		
162.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Yang Rutin / Berkala yang Dipelihara	5 Unit	5	7,805,000	8	17,600,000	8	20,400,000	8	20,400,000	9	21,600,000	9 Unit	87,805,000		
162.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	3 Unit	3	1,260,000	3	1,260,000	3	1,260,000	3	1,350,000	3	1,350,000	3 Unit	6,480,000		
162.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Rutin / Berkala yang dipelihara	9 Unit	6	3,000,000	6	3,000,000	7	3,500,000	6	3,000,000	6	3,000,000	6 Unit	15,500,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik yang Rutin / Berkala yang di Pelihara													0		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum	Jumlah Jaringan Air Minum yang Rutin / Berkala yang di Pelihara													0		
	Rehabilitas Sedang / Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas/Jabatan yang direhab															
162.42	Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	0 Jenis	0	0	3	16,500,000	0	0	1	9,615,000	1	10,000,000	1 Unit	36,115,000		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur	0	73	7,000,000	77	19,780,000	81	19,550,000	85	47,000,000	90	20,000,000	1	113,330,000		
163.2	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapan yang Diadakan	14 Pasang	0	0	14	19,780,000	0	0	20	20,000,000	20	10,000,000	58 Pasang	49,780,000		

2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Simpang Raya

		163.3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
		163.4	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
		163.5	Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu (Batik & Olahraga)	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan	14 Pasang	14	7,000,000	0	0	46 Pasang	19,550,000	40	27,000,000	20	10,000,000	134 Pasang	63,550,000
		4.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Pindah/Purna Tugas PNS yang difasilitasi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	0		0	0	0	0	5	33,500,000	10	29,500,000	10%	63,000,000	
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0		0	0	0	0	3	24,000,000	2	20,000,000	5 Orang	44,000,000	
		165.4	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur		0		0	0	0	0	5	9,500,000	5	9,500,000	5 Dokumen	19,000,000	
		6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	0	92	19,879,800	93	12,738,655	94	13,006,000	95	13,300,000	96	14,000,000	96%	72,924,455
		166.1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan kinerja dan laporan ikhtisar realisasi kinerja pemerintah desa yang disusun	0 Dokumen	0	0	0	0	1	1,858,000	1	1,900,000	1	2,000,000	1 Dokumen	5,758,000
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		166.5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Simpang Raya	7 Dokumen	7	19,879,800	7	12,738,655	7	11,148,000	7	11,400,000	7	12,000,000	7 Dokumen	67,166,455
				2. Indeks Kepuasan Masyarakat		77%	468,263,983	77%	538,110,000	79%	600,000,000	81%	686,640,000	83%	865,990,000	83%	3,159,003,983
				Indeks kepuasan Masyarakat		77%	468,263,983	77%	538,110,000	79%	600,000,000	81%	686,640,000	83%	865,990,000	83%	3,159,003,983
				3. Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		77%		79%	82,576,800	81%	126,190,350	83%	148,650,840	85%	231,835,490	85%	589,253,480
		7.	Program Pembangunan Kemasayarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		77%		79%	82,576,800	81%	126,190,350	83%	148,650,840	85%	231,835,490	85%	589,253,480

2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan SIMPANG RAYA

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Simpang Raya yang Baik, Bersih dan Akuntabel		Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Simpang Raya	0	0	0	0	82,576,800	76	126,190,350	78	148,650,840	80	231,835,490	80%	589,253,480		
	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang berpartisipasi aktif dalam Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya yang dilaksanakan di Kecamatan Simpang Raya			0	1	9,000,000	12	9,000,000	12	11,500,000	12	12,000,000	12 Desa	41,500,000		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat yang Aktif dalam Musrenbang Kecamatan			0	1	22,946,800	200	45,900,000	200	53,600,000	200	57,350,000	600 Orang	179,796,800		
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	Tingkat Penurunan Gangguan dan Presentase			0	1	30,450,000	100%	28,290,350	100%	48,050,840	100%	60,000,000	100%	166,791,190		
	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	Presentase Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan Baik			0	1	20,180,000	75%	43,000,000	78%	35,500,000	80%	102,485,490	80%	201,165,490		
					468,263,983		538,110,000		600,000,000		686,640,000		865,990,000		3,159,003,983		

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai Sesudah SAKIP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1. Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan				1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SIMPANG RAYA						A	460,803,650.00	A	491,189,160.00	A	590,654,510.00	A	1,542,647,230	Sekretariat Kecamatan	Kec Simpang Raya	
	1	1.	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih & Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SIMPANG RAYA						A	460,803,650.00	A	491,189,160.00	A	590,654,510.00	A	1,542,647,230			
		1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	281,858,927						100	335,473,650.00	100	336,242,760.00	100	415,030,860.00	100%	1,086,747,270		
		161.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	1,200,000						425	2,550,000.00	460	2,760,000.00	490	2,940,000.00	2055	8,250,000,-		
		161.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	Persentase jaringan komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	7,000,000						2	34,000,000.00	1	7,000,000.00	1	9,000,000.00	2 Jaringan	50,000,000,-		
		161.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	9,587,000						2	21,559,050.00	2	21,819,560.00	2	22,170,160.00	9	65,548,770,-		
		161.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik	7,156,500						10	8,749,300.00	15	11,209,600.00	15	12,867,100.00	20	32,826,000,-		
		161.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dimanfaatkan dengan Baik	6,695,000						12500	8,645,000.00	13500	9,327,500.00	14500	9,977,500.00	14500 Lembar	27,950,000,-		
		161.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kntnr	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan	-						8	2,670,300.00	8	3,126,100.00	8	3,126,100.00	8 Jenis	8,922,500,-		
		161.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangn	Jumlah Surat Kabar / Majalah Yang di Sediakan	-						1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1 Surat Kabar	9,000,000,-		
	161.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan	64,990,000						3180	69,900,000.00	3350	74,700,000.00	3400	76,450,000.00	16031 Dos	221,050,000,-			

161.18	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik	41,060,000					1Ls	66,000,000.00	1Ls	51,000,000.00	1Ls	102,000,000.00	1Ls	219,000,000,-		
161.19	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	82,010,427					1Ls	68,000,000.00	1Ls	93,500,000.00	1Ls	110,500,000.00	1Ls	272,000,000,-		
161.20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Persentase tenaga administrasi	62,160,000					1Ls	50,400,000.00	1Ls	58,800,000.00	1Ls	63,000,000.00	1Ls	172,200,000,-		
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	168,605,000					86	105,780,000	88	107,946,400	90	155,623,650	90%	369,350,050,-		
162.5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	37,950,000					1	37,620,000	1	30,000,000	2	60,000,000	6 Unit	127,620,000,-		
162.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	2,700,000					3	7,000,000	2	1,800,000	2	5,400,000	15 Jenis	14,200,000,-		
162.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	31,135,000					2	21,000,000	2	18,685,000	3	31,448,650	17 Jenis	71,133,650,-		
162.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair Gedung Kantor yang berfungsi baik	22,490,000					0	0	2	8,096,400	2	6,825,000	9 Jenis	14,921,400,-		
162.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah jabatan/dinas yang rutin dilakukan pemeliharaan	15,800,000					2	15,000,000	2	15,000,000	2	16,000,000	2 Unit Rumah Jabatan	46,000,000,-		

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	-											0		
162.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	16,800,000				8	20,400,000	8	20,400,000	9	21,600,000	9 Unit	62,400,000,-		
162.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00				3	1,260,000	3	1,350,000	3	1,350,000	3 Unit	3,960,000,-		
162.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	4,425,000				7	3,500,000	6	3,000,000	6	3,000,000	6 Unit	9,500,000,-		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik yang Rutin / Berkala yang di Pelihara	0,00											0		
	Pemeliharaan Rutin Berkala/Jaringan Air Minum	Jumlah Jaringan Air Minum yang Rutin / Berkala yang di Pelihara	0,00											0		
	Rehabilitas Sedang / Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas/Jabatan yang direhab	0,00											0		
162.42	Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	37,505,000				0	0	1	9,615,000	1	10,000,000	1 Unit	19,615,000,-		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur	4,900,000				81	19,550,000	85	47,000,000	90	20,000,000	1	86,550,000,-		

163.2	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapan yang Diadakan	0,00					0	0	20	20,000,000	20	10,000,000	58 Pasang	30,000,000,-		
163.3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0,00						0		0		0		0		
163.4	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0,00						0		0		0		0		
163.5	Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu (Batik & Olahraga)	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan	4,900,000					40 Pasangan	19,550,000	40	27,000,000	20	10,000,000	100 Pasang	56,550,000,-		
4.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Pindah/Purna Tugas PNS yang difasilitasi	0						0		0		0		0		
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun	0,00						0		0		0		0		
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	0					0	0	5	33,500,000	10	29,500,000	10%	63,000,000,-		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,00					0	0	3	24,000,000	2	20,000,000	5 Orang	44,000,000		
165.4	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur		0,00						0	5	9,500,000	5	9,500,000	5 Dokumen	19,000,000		

2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Simpang Raya

2	2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan SIMPANG RAYA	2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Simpang Raya yang Baik, Bersih dan Akuntabel	6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	7,283,200						94	13,006,000	95	13,300,000	96	14,000,000	96%	40,306,000,-			
				166.1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan kinerja dan laporan ikhtisar realisasi kinerja pemerintah desa yang disusun	0,00								1	1,858,000	1	1,900,000	1	2,000,000	1 Dokumen	5,758,000	
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	0,00										0	0		0		0	
				166.5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Simpang Raya	7,283,200									7	11,148,000	7	11,400,000	7	12,000,000	7 Dokumen	34,548,000
						2. Indeks kepuasan Masyarakat										79%	600,000,000	81%	686,640,000	83%	865,990,000	83%	2,152,630,000
						Indeks kepuasan Masyarakat										79%	600,000,000	81%	686,640,000	83%	865,990,000	83%	2,152,630,000
						4. Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	0,00									81%	126,190,350	83%	148,650,840	85%	231,835,490	85%	506,676,680
						Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	0,00									81%	126,190,350	83%	148,650,840	85%	231,835,490	85%	506,676,680
						7.	Program Pembangunan Kemasayarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Simpang Raya	0							76	126,190,350	78	148,650,840	80	231,835,490	80%	506,676,680

			Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang berpartisipasi aktif dalam Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya yang dilaksanakan di Kecamatan Simpang Raya	0,00					12	9,000,000	12	11,500,000	12	12,000,000	12 Desa	32,500,000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat yang Aktif dalam Musrenbang Kecamatan	0,00					200	45,900,000	200	53,600,000	200	57,350,000	600 Orang	156,850,000	
			Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	Tingkat Penurunan Gangguan dan Presentase	0,00					100%	28,290,350	100%	48,050,840	100%	60,000,000	100%	136,341,190	
			Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	Presentase Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan Baik	0,00					75%	43,000,000	78%	35,500,000	80%	102,485,490	80%	180,985,490	
					462,647,127						600,000,000		686,640,000		865,990,000		2,152,630,000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebelum dan sesudah SAKIP sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat		76%	77%	79%	81%	83%	83%
2.	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		77	79	81	83	85%	85%

PERUBAHAN RENSTRA
Kec. Simpang Raya 2019

Tabel 7.1.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat		76%	77%	79%	81%	83%	83%

PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Simpang Raya 2019

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Simpang Raya Kab. Banggai

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah				100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%
2.	Tersedianya Dokumen TAPKIN dan IKU				100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%
3.	Tersedianya Administrasi Perkantoran				100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%
4.	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor				100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%
5.	Persentase disiplin Pegawai				75	78	81	83	85%	80	82	85	88	90%	106,66%	105,12%	104,93%	102,40%	105,88%

PERUBAHAN RENSTRA
Kec. Simpang Raya 2019

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Simpang Raya Kab. Banggai

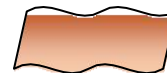
Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	1.423.380.072	1.581.533.413	1.757.259.348	1.952.510.387	2.169.455.985	1.408.719.57	21.567.299.613	1.733.536.47	.935.328.295	2.143.205.568							
Belanja Langsung	463.007.374	514.452.638	571.614.042	635.126.714	705.696.349	454.210.234	504.986.710	559.552.986	627.251.142	685.584.003							

PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Simpang Raya 2019

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Simpang Raya Sebelum SAKIP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Simpang Raya	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih & Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Simpang Raya	B	BB	A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Simpang Raya	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	77%	79%	81%	83%
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Simpang Raya	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Simpang Raya Utara yang baik, bersih dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	77	79	81	83	85%



PERUBAHAN RENSTRA Kec. Simpang Raya 2019

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Simpang Raya Sesudah SAKIP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Simpang Raya	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Simpang Raya yang baik, bersih & Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Simpang Raya			A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Simpang Raya	Indeks Kepuasan Masyarakat			79%	81%	83%



PERUBAHAN RENSTRA

Kec. Simpang Raya 2019

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat		76%	77%	79%	81%	83%	83%
2.	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		77	79	81	83	85%	85%

Tabel 7.1.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat				79%	81%	83%	83%